

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN

Nurmasyitah¹⁾, Mislinawati²⁾

¹⁾(Dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) FKIP Unsyiah)

²⁾(Dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) FKIP Unsyiah)

ABSTRACT

The state of poverty is generally measured by income levels. The income of a household can be derived from three sources: the effort, the work, and the acquisition of the asset portion. Very few poor households have income-generating assets. The first source of income, which is to try with a very small scale and/or work as a laborer, these two things are most likely to be improved, especially for those who really want to work and try. As the organizer of the government is obliged to carry out the mandate of the Act to alleviate poverty. Efforts made especially by local governments are set out in strategic programs to tackle poverty. Plans to tackle poverty and create employment opportunities have been undertaken by governments together with communities through the development and implementation of various poverty reduction programs. The program includes good efforts through the provision of food, health and education services, expansion of employment opportunities, agricultural development, provision of revolving funds as venture capital, construction of basic facilities and basic facilities and business assistance. The government has been working hard to tackle poverty and reduce unemployment. This is realized through the implementation of poverty alleviation programs, especially community empowerment programs and community self-reliance programs through business assistance and credit/working capital assistance.

Keywords: Government, Poverty Alleviation

Pendahuluan

Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern. Menanggulangi dan menentaskan kemiskinan bukanlah usaha yang mudah dan sederhana, tetapi harus dilakukan dengan perencanaan yang terintegrasi dan terkoordinir dengan baik dengan bermacam macam kebijakan yang harus tercermin dalam setiap kebijakan pemerintah dan dilakukan secara

bersama sama oleh pemerintah dan masyarakat dalam waktu yang relatif panjang dan berkelanjutan.

Kota-kota yang sekilas kelihatan sebagai simbol kemajuan dan budaya yang lebih maju, dan seharusnya demikian, ternyata masih dipenuhi oleh problem kemiskinan dengan segala masalah sosial yang disebabkan atau berdampingan dengan masalah sosial lainnya. Pelacuran, pencurian, pemabukan, pengangguran merupakan beberapa contoh yang menimbulkan berbagai bahaya sosial dan krisis sosial yang lebih besar seperti kerusuhan, pembunuhan, perkelahian dan konflik. Kemiskinan telah menjadi bahan bakar sekaligus sumbu pemicu munculnya masalah sosial lainnya.

Pemahaman tentang profil komunitas miskin diperlukan sebagai acuan penanggulangan kemiskinan tidak hanya dalam jangka pendek, namun juga dalam jangka menengah dan panjang. Kajian dan analisis berbagai aspek dan dimensi kemiskinan dan penyebabnya diperlukan untuk mendudukkan permasalahan kemiskinan secara obyektif dan *fair*, agar semua pihak yang terlibat dalam pemecahan masalah sosial ini bisa merubah pola pikir, nilai-nilai, sikap dan perilaku ke arah lebih profesional dan efektif.

Keadaan kemiskinan umumnya diukur dengan tingkat pendapatan. Pendapatan suatu rumah tangga dapat diperoleh dari tiga sumber yaitu berusaha, bekerja, dan perolehan dari pemilikan aset. Rumah tangga miskin biasanya tidak atau sangat sedikit memiliki aset yang dapat mendatangkan penghasilan. Sumber pendapatan yang pertama, yaitu berusaha dengan skala sangat kecil-kecil dan/atau bekerja sebagai buruh, kedua hal inilah yang paling mungkin untuk ditingkatkan, terutama bagi mereka yang memang ingin bekerja dan berusaha.

Masyarakat miskin digolongkan menjadi dua yaitu fakir dan miskin. fakir adalah golongan masyarakat yang sangat miskin dan sulit keluar dari kemiskinan karena tidak memiliki kemampuan yang memadai. Sedangkan miskin adalah golongan masyarakat yang hidup dibawah rata-rata kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan penghasilannya. Kalau dilihat dari segi penghasilan rata-rata golongan fakir memiliki penghasilan perbulan tidak lebih dari Rp 450.000 per kepala keluarga,

sedangkan golongan miskin rata-rata memiliki penghasilan antara Rp 450.000 sampai Rp 900.000/kepala keluarga.

Kemiskinan tidak lahir dengan sendirinya ada beberapa penyebab yang dapat menjadikan seseorang atau masyarakat menjadi miskin. Menurut Syaifuddin (2007:66) Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yaitu:

1. Kemiskinan alamiah. Kemiskinan alamiah terjadi akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah, dan bencana alam.
2. Kemiskinan buatan. Kemiskinan ini terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia hingga mereka tetap miskin

Makmun (2009:195) menyatakan “Apabila dikaji terhadap faktor penyebabnya, maka terdapat kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural mengacu kepada sikap masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh pembangunan yang belum seimbang dan hasilnya belum terbagi merata”.

Minimnya lapangan pekerjaan, kucuran modal bagi masyarakat miskin yang sulit diperoleh serta ditambah lagi dengan sulitnya akses terhadap faktor-faktor produksi membuat masyarakat miskin terus terjebak di ”*lingkaran kemiskinan*”. Masyarakat miskin pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga sulit mendapatkan pekerjaan, walaupun mendapat pekerjaan hanya memiliki gaji/honor yang rendah. Kondisi lain seperti sulitnya memperoleh pinjaman modal oleh perbankan karena berbagai syarat yang tidak mungkin dipenuhi oleh masyarakat golongan miskin.

Kondisi kemiskinan tidak hanya dilihat dari segi berapa penghasilan yang diperoleh namun juga harus diketahui kondisi tempat tinggal dan lingkungan dari masyarakat miskin itu sendiri. Ada beberapa indikator yang dapat dilihat diantaranya luas lantai, jenis atap, jenis dinding, jenis penerangan dan sumber air. Menurut data yang diperoleh sebahagian besar masyarakat miskin kondisi tempat tinggal dan lingkungannya tidak terlalu

berbeda dari masyarakat yang tidak miskin. Ada beberapa daerah tertentu yang tidak memiliki sambungan air bersih. Jika kemiskinan yang dibiarkan terus berlarut-larut dapat berdampak bagi kehidupan sosial di masyarakat. Salah satu persoalan yang diakibatkan dari kemiskinan adalah konflik masyarakat dan tindak kriminal yang dilatar belakangi ekonomi seperti pencurian dan perampokan.

Peran Pemerintah dalam menanggulangi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, pemerintah terus berupaya menjalankan program-program untuk menanggulangi kemiskinan yang ada. Penanggulangan kemiskinan terkait dengan mandat Undang – Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam beberapa pasal diantaranya pasal 27 ayat (2) " tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ", pasal 28 H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Ayat (2) setiap orang mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh persamaan dan keadilan. Ayat (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat. Ayat (4) setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang – wenang oleh siapapun. Pasal 34 menyebutkan " fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Pasal tersebut yang semula ayat tunggal, pada amandemen keempat UUD 45 hal tersebut dipertegas lagi dengan menambah ayat-ayat baru, sehingga pasal 34 menjadi empat ayat. Ayat (2) berbunyi " negara mengembangkan sistem jaminan bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". lingkungan hidup yang kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai

Sebagai penyelenggara Negara pemerintah wajib menjalankan amanah Undang-undang untuk mengentaskan kemiskinan. usaha-usaha yang dilakukan khususnya pemerintah daerah dituangkan dalam program-program strategis untuk menanggulangi kemiskinan. Otonomi daerah memberikan peran yang

nyata pada Pemerintah Kabupaten dan pemerintah kota untuk mengelola daerahnya di berbagai bidang, termasuk diantaranya program pengentasan kemiskinan. Hall dan Midgley (2004:14) menyatakan "Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi di mana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat".

Program Penanggulangan Kemiskinan

Hall dan Midgley (2004:14) menyatakan "Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi di mana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat".

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang ada dimasyarakat dan adalah tanggung jawab semua pihak. Peran pemerintah sangat berarti dalam mengurangi kemiskinan karena memiliki kewenangan dan kemampuan hal tersebut. Program-program pembangunan yang mempunyai sasaran pada penduduk miskin adalah sangat beragam, baik ditinjau dari segi sektor program pembangunan, sektor alokasi anggaran, maupun sektor instansi penyelenggara (governance institution) pelaksana program (implementing agency) penanggung jawab program (executing agency).

Rencana untuk menanggulangi kemiskinan dan menciptakan kesempatan kerja telah dilakukan pemerintah bersama dengan masyarakat melalui pengembangan dan penyelenggaraan berbagai program-program penanggulangan kemiskinan. Program tersebut mencakup upaya-upaya baik melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir sebagai modal usaha, pembangunan sarana dan prasarana dasar maupun pendampingan usaha. Pemerintah telah berupaya keras untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan khususnya program

berbasis pemberdayaan masyarakat dan program peningkatan kemandirian masyarakat melalui pendampingan usaha dan bantuan kredit/modal kerja. Upaya tersebut juga dapat dilihat dari semakin meningkatnya alokasi anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan.

Kesimpulan

Semua masyarakat menginginkan kesejahteraan hidup dan memiliki kemakmuran ekonomi. Fenomena kemiskinan telah ada sejak dulu sampai saat ini. kemiskinan umumnya diukur dari besarnya pendapatan yang diperoleh. Kondisi ini bukan berarti bahwa kemiskinan tidak menjadi masalah yang serius, karena sebesar apapun jumlah kemiskinan yang ada harus tetap diusahakan untuk diatasi dan ditanggulangi.

Pemerintah melakukan berbagai kebijakan lintas sektoral dalam mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin. kebijakan-kebijakan yang diambil diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan terarah yang dimaksudkan adalah pertumbuhan yang merata dan dapat “menyentuh” penduduk miskin. Dalam rangka program pengentasan kemiskinan telah dirancang berbagai program pembinaan sumberdaya manusia dan sekaligus memperbaiki tingkat kesejahtraannya. Hal ini dimaksudkan untuk lebih pemeratakan akses seluruh masyarakat terhadap proses pembangunan dan hasil-hasilnya. Selain itu perlu adanya perhatian khusus terhadap kelompok masyarakat miskin yang relatif tertinggal dan belum beruntung dibandingkan dengan kelompok lainnya. Dilihat dari diagram diatas menggambarkan suatu upaya yang saling terintegrasi dalam mengatasi kemiskinan, karena masalah kemiskinan harus melibatkan antar sektor dan lembaga yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Hall, Anthony dan James Midgley, (2004), *Social Policy for Development*, London :
Sage Publications Ltd
- Makmun (2009). *Gambaran kemiskinan dan action plan penanganannya*. PT. Raja
Grafiika Persada, Jakarta
- Syaifuddin, A Fedyani (2007). *Integrasi Sosial Golongan Miskin di Perkotaan:
Pendekatan Kualitatif Mengenai Kemiskinan, Kertas Kerja dalam Workshop
GAPRI*